

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 15

Agus Janji Tekan Kebocoran PAD Parkir

Dinas Perhubungan Studi Banding Terkait Retribusi Parkir Belangganan

SEMARANG, TRIBUN - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Semarang Agus Riyanto mengakui, sektor perparkiran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Dia pun memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang segera berbenah agar kebocoran anggaran dari parkir bisa ditekan.

"Ini PR yang nanti akan diselesaikan Dishub lewat sistem parkir berlangganan, e-parking, atau lain sebagainya," katanya di Semarang, Jumat (29/6).

Hal itu diungkapkan Agus sesuai peluncuran aplikasi Semarang Smart Transportation City di Kantor Dishub Kota Semarang. Aplikasi Semarang Smart Transportation City merupakan aplikasi untuk membantu memantau trafik transportasi melalui ponsel pintar.

Yang jelas, kata dia, sektor perparkiran umum harus digenjut sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) karena selama ini masih minim memberikan pemasukan. "Ya, kaitannya, bagaimana pendapatan dari sektor parkir bisa meningkat pada 2019. Setelah aplikasi terkait pelayanan transportasi, parkir adalah PR yang akan diselesaikan Dishub," katanya.

Sektor perparkiran umum, belakangan menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang karena selama ini masih minim menyumbang PAD. Padahal, potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, menyebutkan, sektor parkir umum sebenarnya menjadi primadona untuk meningkatkan PAD. Tetapi, kebocoran dari penerimaan retribusi ini membuat target PAD tak tercapai.

Ia mencontohkan, target PAD dari parkir umum pada 2017 ditetapkan Rp 4 miliar. Realisasinya, dalam setahun, PAD yang dikantongi dari parkir hanya Rp 2,5 miliar.

Politikus PDI Perjuangan ini pun mengusulkan, sistem parkir berlangganan. Tujuannya, memutus mata rantai kebocoran penerimaan retribusi parkir, mulai juru parkir, pemilik lahan parkir, hingga petugas penarik retribusi.

"Kalau parkir berlangganan diberlakukan, saya optimistis, PAD dari sektor parkir umum bisa mencapai Rp 20 miliar dalam setahun. Realisasi sekarang ini, kebocorannya masih besar," katanya.

Sistem parkir berlangganan, kata dia, bisa diterapkan bagi pemilik kendaraan asli Kota Semarang. Pembayaran bisa dilakukan bebarengan saat pemilik kendaraan itu membayar pajak kendaraan.

"Jadi, masyarakat tidak perlu repot membayar setiap parkir. Tetapi, parkir berlangganan ini hanya untuk parkir umum, berbeda dari parkir khusus," katanya.

Sementara, Kepala Dishub Kota Semarang, M Khadik, mengaku masih melakukan kajian konsep penataan parkir yang paling pas, terutama terkait mekanisme penarikan retribusi parkir umum. Ada dua konsep yang sedang dibahas, yakni sistem parkir berlangganan dan penggunaan alat "parking meter". Namun, dari dua konsep itu, Khadik mengatakan, parkir berlangganan lebih memungkinkan.

Untuk mempersiapkan konsep tersebut, Dishub Kota Semarang telah mengirimkan tim untuk melakukan studi banding ke 24 kabupaten/kota di Jawa Timur yang lebih dulu menerapkan sistem parkir berlangganan.

Khadik mengatakan, penataan sistem parkir umum mendesak dilakukan karena kemacetan yang kian parah. Selain itu, juga karena target pendapatan dari sektor parkir dinaikkan dari Rp 4 miliar menjadi Rp 15 miliar. **(ant/ira)**

STORY HIGHLIGHTS

- Dishub Jateng gagal penuh target PAD parkir dari yang ditetapkan Rp 4 miliar hanya tercapai Rp 2,5 miliar.
- Tahun ini, target PAD parkir naik menjadi Rp 15 miliar.
- Dishub menggodok dua konsep retribusi parkir, yakni parkir berlangganan dan parkir meter.